

# Analisis Kemampuan Petugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Dalam Melaksanakan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018

Iрмаuli Simanjuntak\*, Tarsyad Nugraha, Asyiah Simanjorang

Institut Kesehatan Helvetia Medan, Indonesia

Email: irmajuntak1980@gmail.com

**Abstrak–Pendahuluan,** Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program sosial dasar yang sangat penting artinya bagi kemajuan suatu bangsa. Program KB Nasional selama ini tidak terlepas dari peranan petugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). Keberhasilan PLKB dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh kemampuan mereka dalam penguasaan Program KB Nasional dalam menghadapi kondisi lingkungan yang terus berubah. **Tujuan,** untuk mengetahui kemampuan petugas PLKB dan upaya peningkatan kemampuan PLKB dalam melaksanakan program KKBPK di Kabupaten Tapanuli Utara. **Metode,** Desain penelitian yang digunakan penelitian dengan kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif (mixed method). Sampel dalam penelitian kuantitatif ini adalah seluruh PLKB yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 26 orang PLKB. Informan untuk penelitian kualitatif adalah PLKB di Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara sebagai informan utama dan Kepala Bidang, Kasubbag program dan Perencanaan Dinas PPKBP3A, dan Kepala Desa sebagai informan triangulasi. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis univariat dan bivariat dengan uji statistik chi square untuk penelitian kuantitatif dan tahapan data reduction, data display, dan conclusion or verification. **Hasil,** nilai p-value variabel pengetahuan sebesar  $0,000 < 0,05$  dan nilai p-value untuk variabel sikap sebesar  $0,003 < 0,05$ . **Kesimpulan,** ada hubungan pengetahuan dan sikap dengan kemampuan petugas PLKB dalam melaksanakan program KKBPK di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018.

**Kata Kunci:** Kemampuan, Petugas PLKB, Program KKBPK

**Abstract– Background,** Family Planning Program (KB) is one of the basic social programs that are very important for the progress of a nation. The National Family Planning Program has been inseparable from the role of Planning Field Planners (PLKB) officers. The success of the PLKB in carrying out their duties is supported by their ability in mastering the National Family Planning Program in the face of changing environmental conditions. **Objectives,** to determine the ability of PLKB officers and efforts to improve the capacity of the PLKB in implementing KKBPK programs in North Tapanuli Regency. **Method,** The research design used in this study is a combination of quantitative and qualitative methods (mixed method). The samples in this quantitative research is that all PLKB in North Tapanuli Regency are 26 PLKB people. The informants for the qualitative research were PLKB in Simangumban District, North Tapanuli Regency as the main informants and Head of Division, Head of Program Sub-Division and Planning of PPKBP3A Office, and the Village Head as triangulation informant. Data analysis used is univariate and bivariate analysis with chi square statistical test for quantitative research and data reduction stages, data display, and conclusion or verification. **Results,** that the p-value of the knowledge variable was  $0.000 < 0.05$  and the p-value for the attitude variable was  $0.003 < 0.05$ . **Conclusion,** there is a relationship between knowledge and attitudes with the ability of the PLKB officers to implement the KKBPK program in North Tapanuli District in 2018.

**Keywords:** Ability, PLKB Officer, KKBPK Program

## 1. PENDAHULUAN

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program sosial dasar yang sangat penting artinya bagi kemajuan suatu bangsa. Program ini memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan sumber daya manusia pada masa kini dan masa yang akan datang menjadi prasyarat bagi kemajuan dan kemandirian bangsa. Terwujudnya keluarga-keluarga yang berkualitas, yang menjadi visi dari Program KB, akan membangun generasi baru Bangsa Indonesia pada masa yang akan datang dan menjadi sumber daya pembangunan yang tangguh dan mandiri, serta mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia, khususnya era globalisasi dan persaingan bebas saat ini. (Simanjuntak, Nugraha, & Simanjorang, 2020)

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Salah satu upaya pemerintah untuk menekan kualitas laju pertumbuhan penduduk melalui upaya pengendalian fertilitas yang instrumennya adalah Program Keluarga Berencana (KB). Sejak pertama kali dicanangkan pada tahun 1970, program KB telah menunjukkan hasil dengan terjadinya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan Total Fertility Rate (TFR), sedangkan tingkat penggunaan kontrasepsi atau *Contraceptive Prevalance Rate* (CPR) mengalami peningkatan. (Hanum & Andiny, 2018)

Badan PBB Urusan Pembangunan UNDP mengatakan indeks pembangunan manusia di Indonesia mengalami kemajuan. Ini terlihat dari angka harapan hidup dan pendapatan nasional bruto per kapita di Indonesia. Secara kuantitas dan kualitas maupun penyebarannya kondisi kependudukan di Indonesia merupakan suatu fenomena yang memerlukan perhatian dan penanganan secara seksama. Salah satu upaya yang perlu dilakukan pemerintah adalah mengendalikan jumlah penduduk dan meningkatkan kualitas dengan cara menggalakkan kembali program KB.

Direktur UNDP Indonesia Christophe Bahuét menyatakan Indonesia sebagai negara berkembang terus mengalami kemajuan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia menempati peringkat ke 110 dari 187 negara, dengan nilai indeks 0,684. Jika dihitung dari sejak tahun 1980 hingga 2015, berarti IPM Indonesia mengalami kenaikan 44,3 persen. Dalam jumpa pers di Jakarta hari Selasa (15/12) mengatakan ada empat indikator yang digunakan untuk mengukur IPM Indonesia tahun 2015, yakni angka harapan hidup sebesar 68,9, harapan tahun bersekolah 13,0, rata-rata waktu sekolah yang sudah dijalani oleh orang berusia 25 tahun ke atas sebesar 7,6 dan pendapatan nasional bruto per kapita 9,788.

Wanita berumur 15 – 49 tahun dan berstatus kawin sebagai peserta KB aktif tahun 2013 sebesar 61,98%, tahun 2014 sebesar 61,75% dan tahun 2015 sebesar 59,98%. Sedangkan wanita berumur 15 – 49 tahun dan berstatus kawin yang sedang menggunakan/memakai alat KB sebesar tahun 51,79%, tahun 2014 sebesar 51,87% dan tahun 2015 sebesar 49,06%. Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa di Propinsi Sumatera Utara peserta KB aktif dan wanita yang sedang menggunakan/memakai alat KB cenderung menurun dalam tiga tahun terakhir sejak tahun 2013 – 2015. (Statistik, 2016)

Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Tapanuli Utara diketahui sebanyak 33.388 jiwa dengan jumlah akseptor KB aktif sebanyak 22.075 atau sekitar 66,61%. Sedangkan jumlah PLKB yang ada di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 26 orang yang ditempatkan di 15 Kecamatan. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa 1 (satu) orang PLKB melayani 1.285 PUS. Jika melihat jumlah Pasangan Usia Subur di Kabupaten Tapanuli Utara dengan Jumlah Petugas PLKB yang ada tidak sebanding, seharusnya target PLKB di Kabupaten Tapanuli Utara berjumlah 252 orang sesuai dengan jumlah desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara. Kondisi ini berdampak terhadap pengelolaan program KB yang dapat berakibat menurunnya pencapaian hasil pelaksanaan program dan meningkatnya angka fertilitas total. (Statistik, 2014)

BKKBN dalam menjalankan program KB menyatakan bahwa faktor utama menjadi penghambat program KB adalah sosialisasi yang kurang baik kepada masyarakat dan kurangnya fasilitas yang mendukung program KB tersebut. Hambatan yang ditemui dalam mensosialisasikan program Keluarga Berencana banyak terjadi di berbagai bidang mulai dari tingkat ekonomi, pengetahuan, pendidikan, usia, pengalaman, pekerjaan, jenis kelamin dan umur dari target sasaran masyarakat yang tidak sama sehingga sulit memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya program KB tersebut. Pola pikir yang sudah tertanam pada target sasaran masyarakat yaitu *“banyak anak banyak rejeki”* juga merupakan faktor penghambat masuknya program KB tersebut. Fasilitas yang kurang memadai, seperti tempat atau ruangan untuk melaksanakan penyuluhan atau sosialisasi program Keluarga Berencana (KB). Kurangnya tenaga penyuluh atau PLKB pada saat akan turun ke lokasi menjadi salah satu faktor penghambat dalam mensosialisasikan program Keluarga Berencana. (Bunyamin, 2014)

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berencana, dan sistem informasi menyatakan bahwa pengaturan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk meningkatkan kualitas keluarga agar timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin dengan melembagakan dan membudayakan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Untuk keberhasilan ini maka sumber daya manusia yang potensial terutama Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) perlu ditingkatkan. Disamping itu perlu adanya partisipasi dari institusi masyarakat (tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat) dalam program keluarga berencana.

Program Keluarga Berencana selama ini tidak terlepas dari peranan petugas PLKB. Keberhasilan PLKB dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh kemampuan mereka dalam penguasaan Program KB Nasional dalam menghadapi kondisi lingkungan yang terus berubah. Peran lingkungan dalam suatu organisasi modern adalah melakukan sejumlah fungsi antara lain, memperkuat organisasi beserta perangkat kerjanya, memberi standar yang tepat untuk apa yang harus dilakukan oleh karyawan, sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memadu dan untuk membentuk sikap serta perilaku pegawai. Selain mempunyai berbagai fungsi yang berdampak positif, organisasi justru dapat ditimpa kegagalan karena peran lingkungan yang tidak diharapkan, yaitu tidak mendorong petugas PLKB pada pencapaian kinerja sebuah organisasi, sehingga organisasi yang mempekerjakan karyawan dan atau sebaliknya, maka akan menghasilkan tingkat kinerja yang relative rendah. (Wursanto, 2005)

Organisasi dibidang Keluarga Berencana, petugas PLKB menempati posisi yang sangat penting dalam pencapaian Program KB Nasional, karena petugas PLKB langsung berhadapan dengan masyarakat. Petugas PLKB dituntut agar dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku hingga mencapai persyaratan-persyaratan pekerjaan tersebut yang akhirnya secara langsung dapat diterima dari jumlah, maupun kualitasnya. (Husain, 2018)

Peraturan Kepala BKKBN Nomor 5 tahun 2017 tentang penyelenggaraan sertifikasi penyuluh kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional mengatakan, Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PLKB adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas melaksanakan, mengelola dan menggerakkan masyarakat dalam program KB di tingkat Desa/Kelurahan dengan uji kompetensi melalui proses penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja melalui metode tertentu dan pengumpulan bukti pendukung yang relevan.

Menurut Green dalam Notoatmodjo, pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang, yang dapat menimbulkan perubahan persepsi dan terbentuknya sikap yang konsisten. Dengan

pengetahuan, sikap dan tindakan yang baik dalam mendorong pemberian imunisasi, sehingga dapat menurunkan angka kematian pada anak. (Simanjuntak et al., 2020), (Hanum & Andiny, 2018)

Survey pendahuluan yang dilakukan pada Januari 2018, ditemukan bahwa PLKB belum mengetahui Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilihat dari kinerja PLKB:

1. Dalam pelaksanaan kinerja PLKB belum sesuai dengan tugas yang diberikan, karena tidak semua PLKB terampil dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga berdampak terhadap hasil kinerja PLKB,
2. Capaian program tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan, karena tidak semua Petugas Lapangan KB mempunyai kemampuan yang memadai,
3. Petugas Lapangan KB masih terlihat setengah hati dalam menjalankan tugasnya, karena masih dipengaruhi oleh sifat-sifat individu yang melekat pada dirinya, sehingga pekerjaan yang seharusnya selesai tepat waktu, diminta dahulu baru dikerjakan

Terdapat empat jenis hubungan antara individu dan lingkungannya yaitu : 1). Individu dapat bertentangan dengan lingkungan, 2). Individu dapat menggunakan lingkungan, 3). Individu dapat berpartisipasi (ikut serta) dengan lingkungannya, dan 4). Individu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. (Hutanto & Apriani, 2014) Menurut Robbins (2012), terdapat beberapa karakteristik organisasi antara lain financial, afiliasi social, pengembangan karir, sarana kerja dan aspek tugas yang kemungkinan menjadi kebutuhan PLKB (Kehidupan, 2011)

Robbins yang mengutip pendapat (Herzberg, 2002), bahwa kinerja seseorang dipengaruhi oleh ketersediaannya faktor *job content* yang meliputi pencapaian prestasi, pengakuan, pekerjaannya, tanggung jawab dan pengembangan potensi individu. Faktor *job content* yang meliputi gaji (financial), kondisi kerja (sarana kerja), hubungan antar pribadi (afiliasi social), promosi (pengembangan karir), aspek tugas, kebijaksanaan administrasi perusahaan, dan kualitas supervisi.

Teori yang menggunakan pendekatan proses dalam peningkatan kinerja adalah teori *Expetancy* dari Vroom. Kinerja akan mencapai titik paling kuat apabila : 1). Individu percaya bahwa hasil-hasil tertentu, 2). Individu merasa bahwa hasil-hasil tertentu itu menarik untuk diperoleh, dan 3). Individu percaya bahwa mungkin baginya untuk mencapai prestasi yang diinginkan sesuai dengan upaya yang dikeluarkannya. (Robbins, 2002)

Rendahnya kinerja dan kepuasan kerja dari PLKB karena apa yang dibutuhkan organisasi tidak terpenuhi dengan baik. Rendahnya motivasi kerja petugas PLKB akan memberikan dampak terhadap pencapaian cakupan KB. Kepuasan kerja yang tinggi akan mendorong peningkatan kinerja individu dan kelompok, yang pada gilirannya akan meningkatkan efektivitas perusahaan secara keseluruhan. (Ruky, 2002)

Hasil penelitian Simanjuntak dkk dukungan PLKB sangat penting terutama untuk memberikan motivasi para kader, tokoh masyarakat, dan masyarakat sehingga dukungan dan dorongan itu diharapkan dapat meningkatkan pelayanan keluarga berencana, yang pada akhirnya diharapkan cakupan kegiatan program KB akan meningkat. Keberhasilan dan kegagalan PLKB dalam pelaksanaan Program KB sering diidentikan dengan keberhasilan dan kegagalan PLKB dalam menumbuhkan partisipasi dan peran serta masyarakat terhadap program KB di wilayah kerjanya, PLKB dituntut harus bekerja secara sistematis, terencana dengan mekanisme kerja operasional yang harmonis dengan para tokoh masyarakat, pimpinan wilayah dan mitra kerja terkait lainnya. Namun kenyataannya berdasarkan pengamatan lapangan ditemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaan kinerja PLKB. (Simanjuntak et al., 2020)(Suryani, Nurjazuli, & Kartini, 2013)

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya maka peneliti tertarik untuk mengetahui kemampuan petugas PLKB dalam melaksanakan Program KKBPK di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kemampuan Petugas PLKB dalam Melaksanakan Program KKBPK di Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini direncanakan menggunakan kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif (*mixed method*), yaitu suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk pendekatan dalam penelitian, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Penelitian campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Penelitian mix methods dilakukan dengan mengkombinasikan antara dua metode penelitian sekaligus, kualitatif dan kuantitatif dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga akan diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel dan objektif.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tapanuli Utara Kecamatan Simangumban oleh karena Kecamatan Simangumban pada bulan Maret sampai dengan bulan September 2018

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh PLKB yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2018 sebanyak 26 orang PLKB. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan dari populasi, yaitu dengan menggunakan seluruh populasi menjadi sampel (*total population*). Sampel dalam penelitian ini sebanyak 26 orang PLKB di Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2018. Informan dalam penelitian ini dibagi dua kategori yaitu informan utama dan informan triangulasi. Karakteristik informan utama adalah PLKB di Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara, Sedangkan informan *triangulasi* adalah Kepala Bidang, Kasubbag program dan Perencanaan Dinas PPKBP3A, dan Kepala Desa. Adapun subyek dalam penelitian ini adalah berjumlah 4 orang

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi dan untuk penelitian kuantitatif menggunakan analisis univariat dan bivariat

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Karakteristik Responden

Hasil pengumpulan data tentang karakteristik bahwa umur PLKB dikelompokkan berdasarkan kategori umur yaitu usia 20 – 29 tahun, usia 30 – 39 tahun dan usia diatas 39 tahun. Responden lebih banyak yang berumur 30 – 39 tahun sebanyak 13 orang (50,0%), berdasarkan pendidikan responden mayoritas berpendidikan SMA yaitu 13 orang (50,0%).

**Tabel 1.** Distribusi Frekuensi Karakteristik PLKB di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018

No.	Karakteristik	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Umur (Tahun)			
1.	20 - 29 tahun	7	26,9
2.	30 – 39 tahun	13	50,0
3.	> 39 tahun	6	23,1
Pendidikan			
1.	SMA	13	50,0
2.	D3	10	38,5
3.	S1	3	11,5

#### 3.2 Analisis Univariat

Hasil pengukuran pengetahuan PLKB tentang pelaksanaan Program KKBPK lebih banyak baik, yaitu 17 orang (65,4%), selebihnya kurang sebanyak 9 orang (34,6%). Hasil pengukuran sikap PLKB terhadap bagaimana pelaksanaan program KKBPK lebih banyak positif, yaitu 18 orang (69,2%), selebihnya negatif yaitu 8 orang (30,8%). Hasil pengukuran pelaksanaan Program KKBPK lebih banyak cukup yaitu 14 orang (53,8%), selebihnya baik sebanyak 5 orang (19,2%) dan kurang sebanyak 7 orang (26,9%).

**Tabel 2.** Distribusi Frekuensi Pengetahuan, Sikap dan Pelaksanaan Program KKBPK di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018

Variabel	f	%
Pengetahuan		
Baik	17	65,4
Kurang	9	34,6
Sikap		
Positif	18	69,2
Negatif	8	30,8
Pelaksanaan Program KKBPK		
Baik	18	69,2
Kurang	8	30,8

#### 3.3 Analisis Bivariat

Hasil penelitian dengan tabulasi silang pada tabel diketahui dari 17 responden yang berpengetahuan baik sebanyak 17 orang (100,0%) pelaksanaan program KKBPK baik dan tidak ada yang pelaksanaan program KKBPK kurang. Dari 9 responden yang berpengetahuan kurang sebanyak 1 orang (11,1%) pelaksanaan program KKBPK baik pelaksanaan KKBPK kurang sebanyak 8 orang (86,9%). Hasil uji statistik chi-square diperoleh nilai  $p < 0,000 < 0,05$ . Hal ini berarti ada hubungan antara pengetahuan dengan pelaksanaan Program KKBPK di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018.

Hasil penelitian dengan tabulasi silang pada tabel diketahui dari 18 orang responden yang bersikap positif sebanyak 16 orang (88,9%) pelaksanaan program KKBPK baik dan sebanyak 2 orang (11,1%) pelaksanaan program KKBPK kurang. Dari 8 responden yang bersikap negatif sebanyak 2 orang (25,0%) pelaksanaan program KKBPK baik dan pelaksanaan KKBPK kurang sebanyak 6 orang (75,0%). Hasil uji statistik chi-square diperoleh nilai  $p < 0,003 < 0,05$ . Hal ini berarti ada hubungan antara sikap dengan dengan pelaksanaan Program KKBPK di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018.

**Tabel 3.** Tabulasi Silang Hubungan Pengetahuan dan Sikap dengan Pelaksanaan Program KKBPK di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018

Variabel	Pelaksanaan Program KKBPK	Total	<i>p-value</i>
----------	---------------------------	-------	----------------

	Ya		Tidak		f	%	
	f	%	f	%			
Pengetahuan							
Kurang	17	100,0	0	0,0	17	65,4	0,000
Baik	1	11,1	8	86,9	9	34,6	
Sikap							
Positif	16	88,9	2	11,1	18	69,2	0,003
Negatif	2	25,0	6	75,0	8	30,8	

### 3.4 Analisa Kualitatif

Informan yang diambil pada penelitian ini adalah narasumber yang dinilai paham dan bergerak langsung dalam pengimplementasian dari kebijakan ini. Informasi yang diterima dari informan berupa data primer melalui hasil wawancara tentang permasalahan yang ingin diteliti.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa petugas lapangan keluarga berencana tidak melakukan komunikasi secara khusus melainkan komunikasi dalam meminta izin untuk mengadakan sebuah kegiatan yang dilakukan PLKB. Dan kepala desa juga tidak tahu menahu tentang PLKB itu sendiri, sehingga ketika peneliti memberikan pertanyaan kepala desa tidak dapat memberikan penjelasan yang banyak mengenai PLKB. Namun dari hasil wawancara dengan PLKB jelas mereka melakukan pendekatan dengan tokoh formal, karena menurut mereka dengan melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan tokoh formal, lebih memudahkan dalam melakukan pendekatan lebih lanjut dengan tokoh-tokoh formal.

Pendataan dan pemetaan itu merupakan salah satu proses yang perlu dilakukan PLKB dalam menjalankan tugasnya, gunanya untuk mengetahui hal apa yang di butuhkan oleh masyarakat di desa yang mereka datangi, begitu juga dalam proses pendataan dan pemetaan yang seharusnya dilakukan lebih dari sekali dalam setahun seperti yang diterangkan oleh Kepala Bidang KB. Sehingga bagi masyarakat yang mempunyai kesibukan di saat PLKB melakukan pendataan dan pemetaan juga dapat berpartisipasi dalam hal tersebut.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa sebagai salah satu tokoh yang harus mendukung program ini agar berjalan dengan lancar dan juga terlibat dalam pembentukan kesepakatan, karena jika Kepala Desa saja tidak mendukung kegiatan yang ada di desa atau terlibat dalam hal ini dapat mengakibatkan ketidakberhasilan suatu program yang diadakan dan tidak berjalan sesuai yang diinginkan pemerintah itu ataupun PLKB. Namun dalam tahap pembentukan kesepakatan pasti banyak pihak yang memberi pendapat atau tanggapan, sehingga terjadi perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan dan membutuhkan waktu untuk memilih program yang akan dijalankan dan sebaliknya ketika pihak terkait memiliki pemahaman yang sama dalam memberi kesepakatan maka program tersebut akan berjalan dengan lancar.

Berdasarkan penjelasan dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pentingnya tokoh informal dalam program KB ini, agar masyarakat lebih tertarik dan percaya terhadap kredibilitas yang di miliki oleh tokoh agama di desa tersebut dibandingkan PLKB itu sendiri yang menjelaskan program tersebut. Dengan begitu akan tumbuh keakraban PLKB dengan tokoh informal yang bersangkutan, mudah memahami program yang di jalankan sehingga tidak menentang dan ragu-ragu terhadap program-program yang dilakukan oleh PLKB.

Hasil wawancara diketahui bahwa PLKB melakukan pemantapan kesepakatan guna untuk membahas kembali hasil dari pembentukan kesepakatan, Pemantapan kesepakatan yang dibuat dalam rapat tersebut di undang tokoh-tokoh masyarakat sehingga PLKB juga mendapatkan dorongan dari tokoh-tokoh masyarakat untuk mendukung kegiatan tersebut agar berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan pada saat rapat.

Hasil wawancara dijelaskan tahapan PLKB dalam berkomunikasi menyampaikan informasi ataupun edukasi, perlu adanya penyesuaian sesuai komunikannya atau dapat dikatakan penerima informasi. Dalam berkomunikasi untuk menyampaikan informasi serta edukasi, selain berkomunikasi langsung PLKB juga menggunakan media, media merupakan salah satu unsur dalam komunikasi. Media adalah alat atau saluran dalam penyampaian suatu informasi.

Adanya *Group Pelopor* memudahkan pihak terkait dan paling utama sangat membantu kinerja PLKB agar lebih efektif dan berbagi cerita tentang hal-hal yang masyarakat ingin ketahui tentang program tersebut.

Hasil wawancara diketahui bahwa PLB biasanya melakukan pelayanan Keluarga Berencana melalui posyandu, sekalian turun lapangan pada saat posyandu, ada balita, ada ibu-ibu hamil jadi bisa sekalian memberikan edukasi penyuluhan.

Pembinaan yang dilakukan biasanya memberikan penyuluhan tersebut pada saat kegiatan posyandu berlangsung, pada saat itu pula para PLKB tidak memberikan penyuluhan mengenai balita saja, namun mengenai remaja dan hal-hal yang berkaitan dengan program yang mereka jalankan, serta pemahaman tentang program tersebut, sehingga masyarakat yang hadir tertarik dan ingin mengikuti program-program tersebut.

Hasil dari wawancara diketahui bahwa PLKB setiap bulan ada buat pencatatan pelaporan, seperti dengan klinik kami berkerja sama, dengan pos KB juga ada kerjasama, pos KB langsung ke masyarakat dapatnya per individu pelaporan. Laporan Klinik biasanya diantar langsung, kemudian dikumpulkan dan direkap. Setiap bulan PLKB akan datang melaporkan ke tingkat Provinsi, untuk selanjutnya dievaluasi berapa banyak jumlah drop out dan mencari penyelesaiannya.

### 3.5 Pembahasan

## a. Hubungan Pengetahuan dengan Pelaksanaan program KKBPK

Hasil uji *chi square* menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan pelaksanaan Program KKBPK di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018 dengan nilai  $p = 0,000 < 0,05$ . Hubungan pengetahuan dengan pelaksanaan Program KKBPK disebabkan PLBK di Kabupaten Tapanuli Utara minimal berpendidikan SMA sehingga mudah untuk menerima informasi yang diterima untuk meningkatkan pengetahuan dan memahami dengan baik tentang Pelaksanaan Program KKBPK, dengan pendidikan yang tinggi akan mempengaruhi pengetahuan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Alibasjah (2014) yang menunjukkan hasil bahwa mayoritas tenaga kesehatan selain dokter dan bidan di empat Puskesmas Kota Madya Cirebon yang bersedia menjadi sampel memiliki pengetahuan yang baik mengenai Program KB yaitu sebesar 76.1% dan secara statistik hubungan ada hubungan antara pengetahuan tenaga kesehatan selain dokter dan bidan terhadap pelaksanaan Program KB dengan nilai  $p=0,976$  ( $p \geq 0,05$ ). Secara statistik ada hubungan antara sikap tenaga kesehatan selain dokter dan bidan terhadap pelaksanaan Program KB dengan nilai  $p=0,10$  ( $p \leq 0,05$ ). (Ricardi & Novandy, 2017)

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan ini terjadi melalui panca indra manusia yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang (*overt behavior*). Perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. (Wawan & Dewi, 2011)

Wawan (2011) Pengetahuan itu sendiri dipengaruhi oleh faktor pendidikan formal. Pengetahuan sangat erat hubungannya dengan pendidikan, dimana diharapkan bahwa dengan pendidikan yang tinggi maka orang tersebut akan semakin luas pula pengetahuannya. Dan lingkungan merupakan suatu kondisi yang ada disekitar manusia dan pengaruhnya yang dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku orang atau kelompok. (Wawan & Dewi, 2011)

Menurut peneliti, pendidikan responden yang mayoritas tinggi memengaruhi tingkat pengetahuan. Proses penerimaan informasi yang bisa meningkatkan pengetahuan menjadi lebih lancar dengan pola pikir responden yang baik akibat dari pendidikan responden yang sudah baik. Selain dari pendidikan formal pengetahuan responden juga dapat diperoleh dari pendidikan non formal, misalnya melalui informasi yang diperoleh lewat iklan atau penyuluhan.

## b. Hubungan Sikap dengan Pelaksanaan program KKBPK

Hasil uji *chi square* menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara sikap dengan pelaksanaan Program KKBPK di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018 dengan nilai  $p = 0,003 < 0,05$ . Hubungan sikap dengan pelaksanaan Program KKBPK disebabkan PLBK di Kabupaten Tapanuli Utara mayoritas berusia muda yakni usia 30-39 tahun. Usia produktif akan lebih ampu bersikap positif dimana PLKB usia muda akan lebih optimis dan termotivasi dalam bekerja dan menyelesaikan pekerjaannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Alibasjah (2014) yang menunjukkan hasil bahwa mayoritas tenaga kesehatan selain dokter dan bidan di empat Puskesmas Kota Madya Cirebon yang bersedia menjadi sampel memiliki sikap yang baik terhadap Program KB yaitu sebesar 96.3% dan secara statistik ada hubungan antara sikap tenaga kesehatan selain dokter dan bidan terhadap pelaksanaan Program KB dengan nilai  $p=0,10$  ( $p \leq 0,05$ ). (Ricardi & Novandy, 2017)

Menurut Notoadmodjo (2016) bahwa sikap akan terwujud dalam tindakan tergantung pada situasi saat itu, mengacu pada pengalaman orang lain, berdasarkan pada banyak dan sedikitnya pengalaman seseorang, dan nilai dalam masyarakat. (Notoadmodjo, 2010) Perubahan sikap menurut Wawan (2011) dapat dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu sumber pesan (petugas kesehatan, tokoh masyarakat dan tokoh agama), isi pesan (informasi yang akan disampaikan) dan penerima pesan. (Wawan & Dewi, 2011) Sedangkan menurut Azwar (2013), sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara - cara tertentu. Kesiapan yang dimaksud disini adalah kecenderungan potensial untuk bereaksi dengan cara tertentu apabila individu dihadapkan pada stimulus yang menghendaki adanya respons. (Saifuddin, 1995)

Menurut Enda (2013) tentang perilaku dan sikap, menyatakan bahwa perubahan sikap dipengaruhi oleh faktor pengetahuan dan kepercayaan yang didapatkan dari hasil penginderaan, salah satunya didapatkan pada pendidikan dan proses belajar. Sama halnya dengan pengetahuan sikap juga menunjukkan adanya perubahan. (Saifuddin, 1995)

Menurut asumsi peneliti bahwa perilaku responden bisa dipengaruhi oleh sikap. Namun sikap itu sendiri sangat tergantung pada situasional tertentu. Misalnya karena sikap tersebut dinilai/ mendapat penilaian maka sebagian besar responden bersikap sangat setuju. Sikap yang didasari pengalaman akan lebih mendalam dan lebih lama berbekas. Seseorang yang dianggap penting akan banyak mempengaruhi sikap dan umumnya individu cenderung untuk memiliki sikap yang *konformis* atau sarah dengan sikap orang yang dianggapnya penting. Selain itu media massa seperti majalah, surat kabar dan buku-buku mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan opini dan kepercayaan orang, sehingga memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya sikap.

## c. Analisis Kualitatif Kemampuan Petugas PLKB dalam Melaksanakan Program KKBPK

Media sangat membantu dalam mengedukasikan program-program yang ada kepada masyarakat, juga menambah informasi dengan mereka melihat media yang disediakan. Dari hasil temuan lapangan BKKBN juga mempunyai situs web untuk memberikan informasi kepada seluruh penduduk kota Tarutung terhadap kegiatan yang PLKB lakukan, selain situs web BKKBN bahkan akun instagram yang saat ini sedang tren di masanya. Media tersebut merupakan

media elektronik yang sangat populer di masa kini, sehingga dengan kehadiran media tersebut sangat membantu PLKB.

Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan oleh seorang kepada orang lain untuk memberi tahu, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik secara lisan (langsung) ataupun tidak langsung (melalui media). Yang mana tujuan komunikasi adalah menurut Kegiatan komunikasi lazimnya dilakukan dengan tiga tujuan yaitu, a) mengetahui sesuatu, b) untuk memberitahu sesuatu, dan c) untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain agar berbuat sesuatu. Onong Uchjana Effendy menjelaskan dalam ilmu, teori dan filsafat komunikasi, yang bahwa tujuan komunikasi itu ada empat tujuan yaitu mengubah sikap, mengubah pendapat atau pandangan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan juga mengubah masyarakat.

Berdasarkan teori diatas bahwa komunikasi itu sendiri menyampaikan sebuah informasi dari satu orang ke orang lain untuk mendapatkan umpan balik dari orang yang diberikan informasi atau juga mengubah pendapat seseorang tentang sesuatu. Begitu juga dengan PLKB dan tokoh masyarakat, dengan mereka berkomunikasi dengan baik dalam hal menyampaikan informasi dan edukasi mengenai masalah program KB, maka hal tersebut dapat menambah wawasan dan pandangan masyarakat di Desa yang diberikan penyuluhan mengenai KB dan juga dapat mengubah pola pikir masyarakat tentang KB di Kabupaten Tapanuli Utara.

Setiap organisasi pasti mendapatkan hambatan baik itu hambatan dari internal maupun eksternal, begitu juga dengan PLKB dalam melakukan komunikasi sepuluh langkah PLKB mendapat hambatan berupa jumlah PLKB yang masih sedikit sehingga mengakibatkan kurang efisien dalam komunikasi yang dilakukan PLKB untuk menyelesaikan sepuluh langkah tersebut, dan juga faktor kurangnya pendanaan dari pemerintah daerah yang menyebabkan timbulnya hambatan tersebut sehingga menyulitkan PLKB untuk melangkah lebih jauh dan lebih maju lagi.

Selain itu pemerintah daerah juga kurang memberikan dukungan yang lebih terhadap PLKB dan kader dalam menyelesaikan program sepuluh langkah PLKB sehingga mengakibatkan masyarakat juga enggan untuk memahami arti PLKB itu dan tidak ingin tahu dampak positifnya dari PLKB untuk diri mereka sendiri. Hal-hal demikian yang menjadi hambatan paling besar untuk PLKB dalam mengambil langkah kedepannya dan butuh kerja keras yang ekstra agar terwujudnya program sepuluh langkah PLKB dan diterima dalam kalangan masyarakat sehingga terciptanya keluarga yang sejahtera kedepannya untuk kehidupan masyarakat.

## 4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan pengetahuan PLKB dengan pelaksanaan Program KKBPK di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018 dengan nilai  $p = 0,000$ , ada hubungan sikap PLKB dengan pelaksanaan Program KKBPK di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018 dengan nilai  $p = 0,003 < 0,05$ . Untuk melakukan penyuluhan PLKB harus melewati 10 langkah yang telah ditetapkan, PLKB dalam melakukan komunikasi sepuluh langkah PLKB mendapatkan hambatan berupa jumlah PLKB yang masih sedikit dan tidak merata di setiap kecamatan yang mengakibatkan kurang efisiennya komunikasi yang dilakukan PLKB dalam menyelesaikan sepuluh langkah tersebut.

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan terkait dengan hasil penelitian ini adalah, bagi Pemerintah daerah diharapkan meningkatkan jumlah PLKB yang masih sangat minim untuk PLKB dapat menjalankan 10 Langkah tersebut dengan lebih baik lagi.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Kepala Desa Silosung Kecamatan Simangumban, perangkat Desa dan Petugas PLKB atas kerjasamanya dan yang telah memberikan tempat untuk dilaksanakannya penelitian hingga selesainya skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bunyamin, B. (2014). Isu Gender Dalam Program Keluarga Berencana. *Jurnal Paralela*, 1(2), 151–158. JOUR.
- Hanum, N., & Andiny, P. (2018). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Usia Perkawinan Pertama dan Kematian Bayi terhadap Fertilitas di Kabupaten Aceh Timur. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 9(2), 160–170. JOUR.
- Husain, B. A. (2018). Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Pada PT. Bank Danamon Tbk Cabang Bintaro). *Jurnal Disrupsi Bisnis: Jurnal Ilmiah Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang*, 1(1). JOUR.
- Hutanto, A. D., & Apriani, F. (2014). Analisis Kinerja Petugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Pada Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kota Samarinda. *E-Journal Administrative Reform*, 2(3), 1941–1953. JOUR.
- Kehidupan, R. (2011). Agustiani, Hendriati.(2006). Psikologi Perkembangan “Pendekatan Ekologi kaitannya dengan Konsep Diri dan Penyesuaian Diri pada Remaja”. Bandung: PT Refika Aditama. *Jurnal Psikologi Undip*. Vol, 10(2). JOUR.
- Notoatmodjo, S. (2010). Ilmu perilaku kesehatan. *Jakarta: Rineka Cipta*, 200, 26–35. JOUR.
- Ricardi, W., & Novandy, B. (2017). Hubungan Pengetahuan dan Sikap terhadap Pelaksanaan Program KB pada Tenaga Kesehatan selain Dokter dan Bidan di Empat Puskesmas Kota Cirebon Jawa Barat. *Tunas Medika Jurnal Kedokteran & Kesehatan*, 1(3). JOUR.
- Robbins, S. P. (2002). Prinsip-prinsip perilaku organisasi. *Jakarta: Erlangga*. JOUR.
- Ruky, A. S. (2002). *Sistem manajemen kinerja*. BOOK, Gramedia Pustaka Utama.
- Saifuddin, A. (1995). Sikap manusia teori dan pengukurannya. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset*. JOUR.
- Simanjuntak, I., Nugraha, T., & Simanjorang, A. (2020). Analisis Kemampuan Petugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana

- (PLKB) Dalam Melaksanakan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018. *Journal of Pharmaceutical and Health Research*, 1(2), 54–61. JOUR.
- Statistik, B. P. (2014). Indeks pembangunan manusia. *Tersedia Pada Htt://www. Bps. Go. Id/menutab. Php*. JOUR.
- Statistik, B. P. (2016). Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2016. *Badan Pusat Statistik Sumatera Utara. Medan*. JOUR.
- Suryani, U. F., Nurjazuli, N., & Kartini, A. (2013). Analisis Kinerja Petugas Lapangan Keluarga Berencana dalam Program KB Pria di Kabupaten Cilacap. DISS, UNIVERSITAS DIPONEGORO.
- Wawan, A., & Dewi, M. (2011). Teori & Pengukuran Pengetahuan, Sikap, Perilaku Manusia Dilengkapi Contoh Kuesioner. GEN, Yogyakarta: Nuha Medika.
- Wursanto, I. (2005). Dasar-dasar Ilmu Organisasi, edisi kedua. *Yogyakarta: Andi*. JOUR.